

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal: Pendekatan Participatory Action dalam Penguatan Tata Kelola Desa

Novayanti Sopia Rukmana^{1*}, Febrianto Syam², Muhammad Nur Yamin³,
Asri Nur Aina⁴, Anna Fiulaizi⁵

^{1,3,4,5} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

² Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Korespondensi : novayanti.sopia@unm.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 10-01-2026

Diterima: 12-02-2026

Diterbitkan: 31-03-2026

Kata Kunci:

Pemberdayaan Masyarakat;
Potensi Lokal; Participatory
Action; Tata Kelola Desa;
Peran DPL; Pengabdian
KKN



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2026 Novayanti Sopia
Rukmana, Febrianto Syam,
Muhammad Nur Yamin, Asri Nur
Aina, Anna Fiulaizi

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal merupakan pendekatan strategis dalam penguatan tata kelola desa. Artikel ini mendokumentasikan peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam memfasilitasi program pengabdian masyarakat berbasis participatory action melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Fungsi pendampingan DPL mencakup identifikasi kebutuhan, fasilitasi perencanaan program, koordinasi lapangan dengan pemerintah desa dan kecamatan, serta evaluasi reflektif bersama mahasiswa. Tiga klaster program yang relevan dengan fokus artikel dibahas secara mendalam: (1) penguatan tata kelola desa melalui transparansi informasi publik dan pengembangan media digital; (2) pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui legalisasi UMKM dan pengembangan aset wisata lokal; serta (3) penguatan kapasitas sosial dan infrastruktur melalui kegiatan kesehatan lingkungan dan revitalisasi fasilitas publik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan DPL yang aktif dalam kerangka partisipatif secara efektif mendorong kolaborasi multipihak, menghasilkan luaran komunitas yang terukur, dan menumbuhkan kapasitas lokal yang berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu modalitas penting dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek kontribusi institusi pendidikan terhadap pembangunan desa. Dalam kerangka ini, peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) tidak dapat dipahami sebatas fungsi administratif semata. DPL berposisi sebagai fasilitator akademik yang menjembatani kompetensi ilmiah mahasiswa dengan kebutuhan empiris masyarakat, sekaligus sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berbasis partisipasi [1].

Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan desa dengan luas wilayah ± 3.421 km² yang dihuni 3.289 jiwa dalam 1.183 kepala keluarga, tersebar di lima dusun dan 12 Rukun Tetangga. Mayoritas penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan UMKM dengan produk unggulan berupa gula merah, kolang-kaling, madu hutan, keripik pisang, dan kerajinan marmer. Desa ini dipimpin oleh Kepala Desa Hairil Anwar, S.Sos., M.M., dengan visi membangun desa yang sejahtera, religius, dan berbudaya menuju desa yang tangguh, unggul, dan hebat.

Meskipun potensi tersebut sangat beragam, hasil observasi awal yang dilaksanakan pada pekan pertama masa KKN mengidentifikasi sejumlah permasalahan struktural yang menghambat pemberdayaan masyarakat secara optimal. Pertama, di bidang tata kelola informasi publik, papan informasi pemerintahan desa menampilkan data struktur organisasi dan alur layanan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini, sehingga masyarakat kesulitan mengetahui kepada siapa mereka harus menghubungi untuk keperluan administrasi tertentu. Selain itu, desa sama sekali belum memiliki akun media sosial resmi yang aktif sebagai kanal penyebaran informasi dan promosi potensi lokal kepada publik yang lebih luas. Kedua, di bidang ekonomi, dari hasil pemetaan lapangan ditemukan terdapat tujuh pelaku UMKM aktif di Desa Tabo-Tabo yang seluruhnya belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas resmi usaha. Kondisi ini menyebabkan para pelaku usaha tidak dapat mengakses program bantuan pemerintah, fasilitas permodalan, dan peluang kemitraan yang lebih luas. Ketiga, di bidang pariwisata, observasi lapangan mengidentifikasi sedikitnya sembilan potensi wisata yang belum terdokumentasi secara sistematis, meliputi enam potensi ekonomi berbasis produk lokal (proses produksi gula aren, budidaya ikan lele, pengambilan madu hutan, produksi kolang-kaling, kerajinan marmer, dan hamparan persawahan) serta tiga tradisi budaya yang berpotensi menjadi daya tarik wisata edukatif (Mappadendang, Mappalili, dan Sere Api). Keempat, di bidang kesehatan dan lingkungan, masyarakat belum memiliki kegiatan olahraga bersama yang terstruktur, sementara kebiasaan membakar sampah dan membuangnya ke sungai masih ditemukan di beberapa dusun, dan semangat gotong royong dinilai mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya.

Pendekatan *participatory action* menawarkan kerangka kerja yang tepat untuk merespons kompleksitas persoalan tersebut. Berbeda dengan model intervensi konvensional yang bersifat top-down, pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif yang terlibat langsung dalam setiap tahapan pemberdayaan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dampak [1]. Dalam konteks KKN, pendekatan ini dioperasionalkan melalui peran DPL yang secara aktif memfasilitasi proses identifikasi kebutuhan, merancang program bersama mahasiswa dan perangkat desa, serta melakukan pendampingan substantif di lapangan.

Inovasi dalam pelayanan publik berbasis teknologi informasi telah terbukti menjadi instrumen penting dalam mengatasi pola layanan pemerintah yang tidak efisien. [2] menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi digital dalam pelayanan perizinan di tingkat pemerintah kota dapat dikategorikan sebagai inovasi radikal yang mengubah secara fundamental proses organisasi dan pelayanan publik. Prinsip yang sama relevan diterapkan di tingkat pemerintahan desa, di mana pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi informasi dan promosi potensi lokal merupakan bagian dari agenda inovasi pelayanan publik yang lebih luas.

Artikel ini mendokumentasikan dan menganalisis pengalaman DPL dalam memfasilitasi program KKN Reguler Angkatan LIII Universitas Negeri Makassar Tahun 2025 di Desa Tabo-Tabo. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga klaster program yang paling relevan dengan tema pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dan penguatan tata kelola desa: penguatan transparansi informasi publik, pemberdayaan ekonomi melalui legalisasi UMKM dan pengembangan wisata lokal, serta penguatan kapasitas sosial dan infrastruktur komunitas.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *participatory action* yang menempatkan DPL sebagai fasilitator utama dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara kolaboratif bersama mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya membangun keterlibatan aktif komunitas sejak tahap identifikasi masalah hingga evaluasi dampak, sehingga menghasilkan program yang kontekstual dan berpotensi berkelanjutan [3]. Kegiatan berlangsung selama kurang lebih dua bulan, dari 3 September hingga 4 November 2025, melibatkan enam mahasiswa KKN dari berbagai program studi, yaitu Ilmu Administrasi Negara, Kewirausahaan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta Bimbingan dan Konseling, di bawah pendampingan DPL dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar.

2.1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, observasi partisipatif, yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi fisik desa, sarana layanan publik, lingkungan, dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis selama dua pekan

pertama masa KKN. Observasi mencakup kunjungan ke seluruh lima dusun (Dusun Salomettie, Tabo-Tabo Selatan, Bonto Tangnga, Padang Pare, dan Pottuppung), pendataan kondisi papan informasi desa, inventarisasi pelaku UMKM aktif, dan pemetaan potensi wisata lokal yang belum terdokumentasi. Dari proses observasi ini teridentifikasi tujuh pelaku UMKM aktif yang belum memiliki NIB dan sembilan titik potensi wisata yang belum dipromosikan secara sistematis.

Kedua, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang dipilih secara purposif, mencakup: kepala desa dan perangkat desa yang membidangi pelayanan publik, ekonomi, dan lingkungan; tokoh masyarakat yang mewakili dusun berbeda; serta pelaku UMKM yang teridentifikasi aktif berproduksi di desa. Total informan berjumlah 13 orang. Ketiga, dokumentasi, berupa pencatatan lapangan harian, perekaman visual kegiatan, dan pengumpulan dokumen perencanaan desa yang relevan sebagai bahan triangulasi.

2.2. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni memilah dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tiga klaster tema: tata kelola informasi publik, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas sosial-infrastruktur komunitas. Tahap kedua adalah penyajian data, berupa uraian naratif yang disertai tabel perbandingan kondisi sebelum dan sesudah program. Tahap ketiga adalah penarikan simpulan dan verifikasi melalui triangulasi sumber antara hasil observasi, wawancara informan, dan dokumentasi lapangan untuk memastikan validitas temuan.

2.3. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan mencakup empat tahapan utama yang difasilitasi DPL secara langsung. Pertama, tahap observasi dan identifikasi kebutuhan pada pekan pertama dan kedua, yang menghasilkan rumusan permasalahan empiris di lapangan. Kedua, tahap perumusan program kerja secara partisipatif yang menghasilkan sebelas program kerja yang disepakati bersama antara DPL, mahasiswa, dan pemerintah desa. Ketiga, tahap implementasi program dari pekan ketiga hingga pekan kesembilan dengan total alokasi waktu 270 jam kerja mahasiswa. Keempat, tahap evaluasi dan refleksi kolektif pada pekan terakhir bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengukur capaian dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.

2.4. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan masing-masing program diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan sejak tahap perencanaan, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

No.	Program	Indikator	Target	Capaian
1	Pembaruan papan informasi desa	Papan informasi terpasang dengan data terbaru dan mudah dibaca	1 papan terpasang	Tercapai
2	Pengembangan media sosial desa	Akun resmi aktif dengan konten lokal terpublikasi	1 akun aktif	Tercapai
3	Sosialisasi dan pendampingan NIB	Jumlah memperoleh NIB teridentifikasi	7 UMKM	Tercapai sebagian
4	Pengembangan potensi desa wisata	Jumlah titik potensi terdokumentasi dan konten promosi diproduksi	9 titik	Tercapai sebagian; terkendala akses lokasi dan belum tersusunnya konsep desa wisata
5	Gerakan kesehatan (senam) rutin	Jumlah pertemuan dan peningkatan jumlah peserta	4 pertemuan	Tercapai; peserta meningkat dari 10 menjadi 20 orang
6	Jumat Bersih Lingkungan	Kegiatan bergilir terlaksana di seluruh dusun dengan partisipasi aktif warga	5 dusun	Tercapai
7	Revitalisasi Lapangan Samalewa	Lapangan bersih dan 4 tiang lampu terpasang	4 tiang lampu	Tercapai

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penguatan Transparansi Informasi Publik Desa

Salah satu permasalahan mendasar yang ditemukan di Desa Tabo-Tabo adalah lemahnya sistem informasi publik desa. Papan informasi pemerintahan yang tersedia menampilkan data struktur organisasi dan alur layanan yang sudah tidak relevan, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui dengan jelas kepada siapa mereka harus mengajukan keperluan administrasi tertentu. Kondisi ini mencerminkan rendahnya akuntabilitas informasi pemerintahan desa dan berpotensi menurunkan kepercayaan

masyarakat terhadap pelayanan publik. Selain itu, desa sama sekali belum memiliki kanal informasi digital yang aktif, sehingga potensi lokal yang dimiliki tidak dikenal oleh publik yang lebih luas.

Intervensi yang dilakukan mencakup dua program yang saling melengkapi. Program pertama adalah pembenahan dan pembaruan papan informasi pemerintahan desa, yang dilaksanakan melalui tahapan observasi kondisi awal, pengumpulan data terbaru mengenai struktur organisasi dan alur pelayanan, desain ulang tampilan, serta pemasangan di lokasi yang mudah diakses masyarakat. Program kedua adalah pengembangan akun media sosial resmi kantor desa, mencakup produksi konten yang menampilkan profil desa, kegiatan pemerintahan, serta potensi ekonomi lokal seperti proses produksi gula aren, budidaya ikan lele, pengambilan madu hutan, produksi kolang-kaling, dan kerajinan marmer.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat terlihat dari dua aspek. Secara fisik, papan informasi desa kini menampilkan data yang akurat, rapi, dan informatif, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pelayanan publik secara mandiri tanpa harus bertanya langsung kepada perangkat desa. Aparatur desa menyatakan bahwa pembaruan ini membantu warga memperoleh informasi terkini mengenai layanan publik dan mengurangi miskomunikasi dalam proses administrasi. Secara digital, akun media sosial resmi desa kini aktif dan mulai menjangkau khalayak yang lebih luas. Masyarakat menyadari bahwa aktivitas ekonomi sehari-hari mereka memiliki nilai promosi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa. [2] menegaskan bahwa transformasi digital dalam proses pelayanan pemerintah, meskipun beroperasi pada skala yang berbeda, merupakan bentuk inovasi yang mengubah secara fundamental pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. [5] menambahkan bahwa pelatihan pengelolaan platform digital bagi aparatur desa merupakan investasi strategis yang berdampak ganda: meningkatkan transparansi tata kelola sekaligus memperluas jangkauan promosi potensi desa. Dari sisi keberlanjutan, pengelolaan akun media sosial telah sepenuhnya diserahkan kepada aparatur desa untuk dikelola secara mandiri pascapelaksanaan KKN [6].

Gambar 1. Papan struktur organisasi pemerintahan Desa Tabo-Tabo yang telah diperbarui



3.2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

Permasalahan ekonomi yang diidentifikasi di Desa Tabo-Tabo bersifat berlapis. Dari tujuh pelaku UMKM aktif yang teridentifikasi selama observasi awal, seluruhnya belum memiliki NIB sebagai legalitas resmi usaha. Ketidadaan NIB menyebabkan pelaku usaha tidak dapat mengakses program bantuan pemerintah, fasilitas permodalan dari lembaga keuangan formal, dan peluang kemitraan yang lebih luas. Produk-produk unggulan desa seperti kolang-kaling, madu hutan, keripik pisang, dan gula merah memiliki kualitas dan keunikan yang berpotensi bersaing di pasar yang lebih luas, namun tanpa legalitas formal potensi tersebut sulit dioptimalkan. Di sisi lain, dari sembilan titik potensi wisata yang teridentifikasi, belum satu pun yang terdokumentasi secara sistematis atau dipromosikan kepada publik eksternal desa.

Intervensi dilaksanakan melalui dua program yang saling berkaitan. Program sosialisasi dan pendampingan NIB berlangsung selama dua hari, mencakup sesi penyuluhan tentang manfaat kepemilikan NIB, prosedur pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta pendampingan langsung dari pembuatan akun OSS hingga terbitnya NIB bagi masing-masing peserta. Program pengembangan potensi desa wisata dilaksanakan melalui survei lapangan sebanyak empat kali, pendokumentasian visual seluruh titik potensi, diskusi partisipatif bersama perangkat desa dan masyarakat, serta produksi konten promosi digital yang diunggah melalui akun media sosial resmi desa. [7] menegaskan bahwa pembangunan desa wisata yang efektif diawali dari proses identifikasi dan dokumentasi aset lokal secara

sistematis dengan pelibatan penuh masyarakat dalam perencanaan, sehingga menghasilkan model pariwisata yang berakar pada keunikan budaya dan sumber daya setempat.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat mencakup dua dimensi. Pada dimensi legalitas usaha, sejumlah pelaku UMKM dari tujuh yang teridentifikasi berhasil memperoleh NIB dan menyatakan antusiasme untuk mengembangkan usaha secara lebih formal dan terstruktur. [6] mengemukakan bahwa kepemilikan NIB memberikan perlindungan hukum sekaligus membuka akses terhadap ekosistem ekonomi formal, termasuk kemudahan mengakses berbagai program bantuan pemerintah, peningkatan kepercayaan konsumen, serta perluasan peluang kemitraan usaha. Pada dimensi pariwisata, perubahan yang paling signifikan terjadi pada kesadaran kolektif masyarakat: aktivitas ekonomi sehari-hari yang sebelumnya dianggap biasa kini dipandang memiliki nilai wisata edukatif yang layak dikembangkan. Pemerintah desa dan masyarakat memberikan respons positif dan menyatakan kesiapan untuk menyusun rencana pengembangan desa wisata jangka panjang. Dari sisi keberlanjutan, evaluasi program menunjukkan masih terdapat hambatan berupa akses menuju beberapa lokasi potensi yang belum memadai dan belum tersusunnya konsep desa wisata secara sistematis. Rekomendasi yang diberikan mencakup pembentukan kelompok sadar wisata, penyusunan paket wisata edukatif, dan penguatan promosi melalui pengelolaan media sosial secara konsisten.

Gambar 2. Pendampingan langsung pembuatan NIB bagi pelaku UMKM Desa Tabo-Tabo melalui sistem Online Single Submission



3.3. Penguatan Kapasitas Sosial Masyarakat

Permasalahan di bidang kesehatan dan lingkungan bersumber pada dua kondisi yang saling berkaitan. Masyarakat Desa Tabo-Tabo belum memiliki kegiatan olahraga bersama yang terstruktur dan berkesinambungan, yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, obesitas, dan diabetes. Pada saat bersamaan, semangat gotong royong dinilai mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya, yang tercermin dari kebiasaan sebagian warga membakar sampah dan membuangnya ke sungai serta rendahnya inisiatif kolektif dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan desa.

Intervensi dilaksanakan melalui dua program yang berjalan secara paralel. Program Gerakan Kesehatan Rutin berupa senam bersama dilaksanakan sebanyak empat kali selama masa KKN, setiap pekan pada hari Minggu pagi di lapangan desa, dengan peserta dari kalangan ibu-ibu PKK dan aparatur desa. Program Jumat Bersih Lingkungan dilaksanakan setiap pekan dengan sistem bergilir di lima dusun, melibatkan perangkat desa, karang taruna, dan warga untuk membersihkan area publik mencakup halaman kantor desa, jalan utama, dan saluran drainase.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, jumlah peserta senam meningkat signifikan dari rata-rata 10 orang pada pertemuan awal hingga pekan keenam, menjadi 20 orang pada pekan ketujuh, mencerminkan tumbuhnya antusiasme dan penerimaan masyarakat terhadap program. Beberapa peserta secara spontan menyatakan minat untuk melanjutkan kegiatan senam secara mandiri setelah masa KKN berakhir. [8] menegaskan bahwa senam rutin yang dilaksanakan secara bersama tidak hanya berdampak pada peningkatan kebugaran fisik, melainkan juga memperkuat kohesi sosial antarwarga melalui interaksi reguler yang terstruktur. Secara kualitatif, Program Jumat Bersih berhasil membangkitkan kembali semangat gotong royong yang sebelumnya menurun. [9] menegaskan bahwa gotong royong dalam konteks kebersihan lingkungan bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan wujud solidaritas sosial yang mempererat hubungan antarwarga dan menumbuhkan rasa memiliki kolektif terhadap ruang hidup bersama. Dari sisi keberlanjutan, pemerintah desa menyatakan komitmen untuk menjadikan kedua program ini sebagai kegiatan rutin desa pascapelaksanaan KKN.

3.4. Revitalisasi Infrastruktur Publik untuk Mendukung Aktivitas Komunitas

Lapangan Samalewa sebagai ruang publik utama di kecamatan menghadapi permasalahan kondisi fisik yang tidak terawat: penuh rumput liar, tumpukan sampah, dan tanpa penerangan yang memadai. Akibatnya, lapangan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal pada sore hingga malam hari, membatasi fungsinya sebagai ruang sosial, olahraga, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar termasuk pelaku UMKM.

Intervensi dilaksanakan melalui gotong royong massal yang melibatkan mahasiswa KKN, warga, dan pemerintah kecamatan dalam satu hari penuh. Kegiatan mencakup pembersihan seluruh area lapangan dari sampah dan

rumpun liar serta pemasangan empat tiang lampu penerangan di setiap sudut lapangan.

Perubahan yang terjadi bersifat langsung dan terukur. Kondisi lapangan yang kini lebih bersih, tertata, dan terang memungkinkan pemanfaatan yang lebih optimal untuk berbagai aktivitas sosial, olahraga, dan ekonomi komunitas, termasuk oleh pelaku UMKM yang berjualan di sekitar area lapangan. [10] mengemukakan bahwa revitalisasi ruang publik yang berhasil adalah yang mampu memulihkan fungsi sosial, ekonomi, dan budaya suatu kawasan sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif masyarakat terhadap fasilitas umum. Dari sisi keberlanjutan, seluruh proses kegiatan telah terdokumentasi sebagai referensi bagi pengembangan program revitalisasi serupa pada periode berikutnya, dan pemerintah kecamatan menyatakan komitmen untuk mendukung pemeliharaan lapangan secara berkelanjutan.

Gambar 3. Pemasangan tiang lampu penerangan dalam program revitalisasi Lapangan Samalewa



4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program KKN Reguler Angkatan LIII Universitas Negeri Makassar Tahun 2025 di Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, membuktikan bahwa pendekatan participatory action yang berpijak pada identifikasi potensi lokal merupakan modalitas efektif dalam pemberdayaan masyarakat desa. Empat klaster program yang diimplementasikan secara kolaboratif antara mahasiswa, DPL, pemerintah desa, dan masyarakat menghasilkan perubahan yang terukur dan berdampak langsung pada kehidupan komunitas.

Pada klaster pertama, penguatan transparansi informasi publik menghasilkan perubahan nyata pada aksesibilitas masyarakat terhadap informasi layanan pemerintahan desa, yang sebelumnya terhambat oleh papan

informasi yang usang dan ketiadaan kanal digital resmi. Pada klaster kedua, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal berhasil mendorong sejumlah dari tujuh pelaku UMKM yang teridentifikasi untuk memperoleh legalitas usaha melalui NIB, sekaligus membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat bahwa sembilan potensi wisata lokal yang dimiliki desa memiliki nilai ekonomi yang layak dikembangkan. Pada klaster ketiga, penguatan kapasitas sosial melalui gerakan kesehatan rutin dan program kebersihan lingkungan berhasil menumbuhkan kebiasaan hidup sehat dan memulihkan semangat gotong royong yang sebelumnya menurun, dengan peningkatan jumlah peserta senam dari 10 orang menjadi 20 orang sebagai indikator konkretnya. Pada klaster keempat, revitalisasi Lapangan Samalewa melalui gotong royong massal memulihkan fungsi ruang publik sebagai sarana sosial, olahraga, dan ekonomi komunitas yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

Keberhasilan program secara keseluruhan tidak hanya menghasilkan luaran fisik dan administratif, tetapi juga menumbuhkan kapasitas kolektif masyarakat untuk merencanakan dan mengelola pembangunan desa secara lebih mandiri. Aspek keberlanjutan menjadi catatan penting: papan informasi dan akun media sosial desa yang kini dikelola aparatur secara mandiri, komitmen pemerintah desa untuk meneruskan kegiatan senam dan Jumat Bersih sebagai agenda rutin, serta komitmen pemerintah kecamatan dalam pemeliharaan Lapangan Samalewa, merupakan indikator bahwa program-program tersebut telah berakar pada komunitas dan bukan sekadar kegiatan musiman.

Ke depan, pengembangan program pengabdian berbasis KKN perlu lebih memperhatikan tiga hal. Pertama, penguatan mekanisme pemantauan pascapelaksanaan untuk memastikan keberlanjutan capaian program. Kedua, pengembangan konsep desa wisata secara sistematis melalui pembentukan kelompok sadar wisata dan penyusunan paket wisata edukatif berbasis budaya dan produk lokal. Ketiga, peningkatan kapasitas pelaku UMKM secara berkelanjutan tidak hanya pada aspek legalitas, tetapi juga pada pemasaran digital dan manajemen usaha, agar kepemilikan NIB dapat benar-benar dikonversi menjadi peningkatan daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atas dukungan dan koordinasi yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Apresiasi yang tulus disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Bungoro atas fasilitasi koordinasi awal yang sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program. Penghargaan khusus ditujukan kepada Pemerintah Desa Tabo-Tabo, khususnya Kepala Desa Hairil Anwar, S.Sos., M.M., beserta seluruh perangkat desa atas sambutan hangat, fasilitas, dan kerja sama yang diberikan sepanjang masa pengabdian. Terima kasih yang setinggi-tingginya juga ditujukan kepada

seluruh mahasiswa KKN Reguler Angkatan LIII Universitas Negeri Makassar Tahun 2025 Desa Tabo-Tabo, yaitu Aidil Budiman, Vivi Afriani Malik, Muh. Fahd Abd. Qahhar, Muthya Azy Azzura Tanawali, Muh. Sri Bintang, dan Eka Nadilah Putri, atas dedikasi, semangat pengabdian, dan kerja keras yang telah ditunjukkan dalam setiap program kerja.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Rahmat A, Mirnawati M. Model participation action research dalam pemberdayaan masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 2020;6:62–71.
- [2] Rukmana NS, Ismail I, Sakawati H. E-lebbami: an innovation of information technology in services at dpmptsp of makassar city. *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1899, IOP Publishing; 2021, p. 012078.
- [3] Sufaidah S, Widya MAA, Anandita SR, Masyhari MF, Ubaidillah U, Joyo SSD, et al. Implementasi Participatory Action Research dalam Pemberdayaan UMKM Desa Plemahan melalui Digital Marketing. *Jumat Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2025;6:113–7.
- [4] Mustoip S, Al Ghozali MI. Mewujudkan Potensi Desa Gintungranjeng melalui Pendekatan Asset-Based Community Development. *Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat* 2022;1:44–55.
- [5] Pinontoan NA, Ramadhona CF. Optimasi pemasaran digital dan media sosial untuk peningkatan daya saing UMKM Desa Ngargoretno. *Journal Of Human And Education (JAHE)* 2024;4:15–9.
- [6] Millani AI, Libragiantar ED, Putra DM, Roofif AB, Asmyndar RF. Sosialisasi dan Pendampingan Pentingnya NIB untuk UMKM Kelurahan Gunung Anyar secara Door To Door. *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara* 2023;2:38–47.
- [7] Rahayu HA, Istikhomah I, Fatmawati N, Usami RW, Dari FU, Habib MAF. Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development Di Desa Mojokambang. *Greenomika* 2022;4:31–43.
- [8] Yuliasutik Y, Al Mursyidi BM, Noviyanti DV, Halizah SN, Darmawan D. Upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dengan kegiatan senam pagi di Desa Sedenganmijen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat* 2023;3:21–30.
- [9] Firdaus RA, Fakhroji H, Wandira VS, Siagian KG, Bustomi T. Revitalisasi Budaya Gotong Royong untuk Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Sehat di Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat* 2025;6:739–45.
- [10] Gitariyanto O, Mega Ilhamiwati M, Soleha S. Pengaruh Revitalisasi Lapangan Setia Negara Terhadap Pendapatan UMKM Dengan Tingkat Kepuasan UMKM Sebagai Variabel Mediasi 2025.